

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Penyelenggaraan pemerintah dan politik ditingkat local mengalami pergeseran, bahkan perubahan yang luar biasa sejak Juni 2005. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh anggota parlemen daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilukada sejak 1 juni 2006.

Pemilihan umum kepala daerah atau yang biasa disebut dengan pemilukada ini, merupakan salah satu wujud dari system demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Dalam proses ini diadakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang mana sebelumnya hanya penonton tetapi berubah menjadi pelaku dan penentu.

Perubahan yang signifikan ini tentu membawa dampak yang luar biasa, baik ditingkat elit partai dan para pemilih itu sendiri yakni rakyat. Elit politik yang kemudian akan menjadi bagian dalam sebuah proses pemilihan umum, akan bersaing untuk memperoleh kedudukan sebagai pemimpin khususnya dalam sebuah daerah. Mereka akan berkompetisi untuk memperoleh dukungan atau suara terbanyak dari rakyat sehingga dalam perebutan kekuasaan ini, para actor atau elit politik beserta kendaraan politik (partai politik) tersebut menggunakan berbagai macam cara atau strategi. Begitupun dengan rakyat sebagai kelompok orang yang akan dipimpin, tentu memiliki peran penting dalam sebuah pemilihan umum, sehingga terjadi interaksi antar kedua unsur penting ini agar system demokrasi yang dianut dapat benar-benar terwujud dalam sebuah pemilihan umum kepala daerah dan dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya pembajakan otoritas dari rakyat oleh para wakil di lembaga-lembaga perwakilan. Hal ini terjadi karena didalam pemilihan umum secara langsung, rakyat

dapat menentukan pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki secara lebih otonom. Meski dalam menetapkan pilihannya, rakyat tidak sepenuhnya otonom. Hal-hal lain seperti ideologi, keyakinan, dan agama, kelas, kelompok, dan relasi-relasi lain, dapat berperan untuk memberikan pengaruh terhadap pilihan rakyat. Tetapi adanya prosedur bahwa dapat menentukan pilihannya di bilik-bilik pengumutan suara secara jujur dan adil, lebih memungkinkan para pemilih lebih otonom.

Selain itu, pemilihan umum secara langsung juga dimaksudkan agar para pemimpin yang terpilih itu memiliki akuntabilitas yang lebih besar kepada rakyat yang memilihnya. Para pemimpin itu, paling tidak, akan mengingat yang mendukung diri mereka sebagai pemimpin itu bukan sekelompok kecil orang, melainkan para pemilih. Konsekuensinya, secara teoritis, pemilih secara langsung akan menjangkau pemimpin-pemimpin yang memiliki program lebih baik, serta akan berusaha mengimplementasikan program-program itu ketika benar-benar terpilih. Jika tidak maka sulit bagi pemimpin tersebut untuk dapat kembali memperoleh kekuasaan jika mengikuti lagi kompetisi dalam pemilihan umum di daerah.

Seperti halnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu daerah atau wilayah yang berada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah sebagai wujud demokrasi ditingkat daerah dan berada dalam satu gerbong dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, baik secara administrasi maupun Politik, yaitu di dalam UU No. 23 tahun 2014. Sehingga dalam pilukada ini masyarakat di kabupaten sleman memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2015-2020.<sup>1</sup>

Terdapat dua pasangan calon bersaing untuk mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin di Kabupaten Sleman. Pasangan calon ini tentunya memiliki visi dan misi yang

---

<sup>1</sup>[http://www.humas.ketapang.go.id/layanan/UU\\_NO\\_2\\_2015%20TTG%20PERUBAHAN%20UU%20NOMOR%2023%20TAHUN%202014.pdf](http://www.humas.ketapang.go.id/layanan/UU_NO_2_2015%20TTG%20PERUBAHAN%20UU%20NOMOR%2023%20TAHUN%202014.pdf)

berbeda guna kemajuan masyarakat di kabupaten sleman. Untuk itu, para calon ini mempersiapkan cara atau startegi politiknya untuk meraup dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Untuk itu, dalam pemilukada kali ini partai sebagai kendaraan politik harus menempatkan startegi yang dapat memenangkan bakal calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati, karena itu harus ada pemilihan kampanye politik dan koalisi partai yang tepat sebagai bentuk strategi untuk memenangkan pemilukada Bupati di Kabupaten Sleman.

Strategi kampanye politik yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Melalui kampanye politik, Partai Politik melakukan pemasaran program agar membuat rakyat memilih calonnya sebagai pemimpin di daerah. Dalam pemasaran program ini terdapat tahapan-tahapan yang disusun terlebih dahulu melalui tim sukses yang dibentuk oleh Partai Politik atau calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sleman resmi menetapkan pasangan Sry Purnomo-Muslimatum dan Yuni-Danang untuk bertarung dipilkada selemam 9 Desember kemarin, kedua pasangan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan KPU. Melalui surat keputusan KPUD Kabupaten sleman 21/KPTS/KPU-Kab-013.329625/2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman 2015, kedua pasangan ini resmi menjadi peserta yang bertarung dipilkada 9 desember kemarin.

Partai yang mengusung pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun terdiri atas lima partai pengusung dan tiga partai pendukung. PAN, Demokrat, Golkar, Nasdem, dan PKB resmi menjadi partai pengusung. Sementara PPP, PBB, Hanura menjadi partai pendukung pasangan

ini. Sedangkan pasangan Yuni dan Danang adalah PDI dan Partai Gerindra saat mendaftar ke KPUD Kabupaten Sleman, tetapi PKS juga akhirnya bergabung.<sup>2</sup>

Dalam sebuah pilukada partai politik merupakan organisasi yang paling memiliki peran dominan dalam mengajukan seorang calon atau kandidat. Meskipun telah terbuka peluang bagi calon atau kandidat yang maju tanpa dukungan partai politik (independen) akan tetapi cara seperti ini kurang dominan. Partai politik hingga saat ini masih dominan digunakan oleh para calon kepala daerah untuk mendapatkan masa atau dukungan. Karena di Indonesia sebagian besar masyarakatnya masih memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai politik yang mereka sukai. Dan hal itu sudah terbukti dari beberapa pilukada yang sudah digelar di beberapa daerah, di Indonesia banyak kandidat yang berhasil menduduki kursi kepala daerah karena diusung oleh partai yang sudah memiliki basis masa yang besar dengan strategi politik yang tepat

Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, merupakan partai politik yang berhasil menancapkan kukunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya di Kabupaten Sleman. Dari beberapa pilukada yang digelar di beberapa kabupaten atau Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) salah satunya dimenangkan oleh kandidat yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Misalnya, pilukada yang digelar secara serentak di tiga Kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 9 Desember 2015 kemarin.<sup>3</sup>

Dengan strategi yang baik dan terstruktur, dalam hal kampanye politik, perekrutan kader, dan pencarian partai koalisi dalam mengusung kandidat, Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil memenangkan kandidatnya yaitu Sri Purnomo dan Sri Muslimatum sebagai Bupati

---

<sup>2</sup><http://jogja.tribunnews.com/topics/pilkada-sleman>

<sup>3</sup><http://jogja.tribunnews.com/2015/02/27/pilkada-serentak-diy-awal-desember>

dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman untuk periode 2015-2020. Dengan perolehan suara sebanyak 249,452 suara dengan presentasi sebesar 57.16 %

Dalam pemilihan serentak yang diselenggarakan pada bulan Desember kemarin banyak partai yang mempersiapkan matang-matang strategi politik dan koalisi politik untuk sampai pada puncak kemenangan, untuk menyambut pemilu serentak. Partai Amanat Nasional (PAN) mealukan pembacaan situasi dan merancang strategi yang tepat dengan membangun koalisi delapan partai dan basis masa yang sengaja disebarakan ke setiap dusun untuk melakukan penyadaran politik / pendidikan politik. Dalam persiapan lainnya dalam menghadapi pilkada serentak ini, DPP PAN telah melakukan berbagai persiapan. DPP PAN selain telah melakukan sekolah bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga baru saja melaksanakan workshop bagi para pendamping yang nantinya akan terjun di berbagai daerah yang akan melaksanakan pilkada 2015, dan untuk meningkatkan potensi kemenangan.<sup>4</sup>

Dan hal yang menjadi menarik dalam study ilmu politik saat ini adalah persoalan pertarungan partai politik yang makin sulit terbaca, hasil kemenagan kemenangan PDI di pilkada 2011 kemarin tak bisa dipungkiri bahwa sepak terjangnya cukup berpengaruh dan luar biasa, hal ini terbukti dari kemenanganya dari pilkada serentak di DIY pada tahun 2011 kemarin, dima PDI memenangkan tiga Kabupaten sekaligus di DIY, diantaranya pemilihan Walikota Jogjakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo, dan salah-satu basis terbesar nya adalah Kabupaten Sleman.

Tetapi ternyata kemenangan (PDI) dalam pilkada 2011 di Sleman, hal ini tidak menjamin kemenangannya yang kedua kalinya. dalam pilkada 9 desember 2015 di Kabupaten Sleman yang tampil sebagai pemenangnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut saya dengan keberhasilan PAN dalam memenangkan pemilukada di Kabupaten Sleman

---

<sup>4</sup><http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/27/dewanpenguruspemilu.pan>

merupakan hal yang luar biasa. PAN merupakan partai politik yang mampu memainkan perannya dalam memenangkan calonnya tersebut, hal ini membuktikan bahwa peran Partai Politik sangat penting dalam hubungan politik yang ada, karena dari partai itulah maka koneksi, strategi politik dapat dimainkan secara massif dan terorganisir.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya yakni sebagai berikut:

Bagaimana strategi politik PAN dalam memenangkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam pemilu di Kabupaten Sleman tahun 2015 ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mendeskripsikan strategi politik yang digunakan Partai Amanat Nasional dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman periode 2015-2020

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu politik.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui strategi politik PAN dalam pemilu Kabupaten Sleman Tahun 2015

### 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih dan menentukan kepala daerah guna terciptanya interaksi politik yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat selanjutnya.
- b. Sebagai masukan bagi para competitor pemilukada di Kabupaten Sleman pada periode berikutnya agar menjalankan amanah konstitusi dan menjunjung nilai-nilai demokrasi serta merealisasikan visi misi yang disosialisasikan kepada masyarakat agar terciptanya sebuah keseimbangan system politik yang baik di Kabupaten Sleman.

## **E. KERANGKA DASAR TEORI**

Teori pada dasarnya menjadi tumpuan sebuah wacana dalam menelusuri realitas objektif, teori juga merupakan titik tolak berpijak bagi langkah selanjutnya agar pembahasan tidak menentang dari topic yang akan diteliti, teori juga menjadi salah satu unsur penelitian yang penting untuk menerangkan kondisi social yang menjadi perhatian.

### **1. Strategi Politik**

Dalam sebuah kompetisi politik, keunggulan dalam menjalankan strategi politik, merupakan salah satu penentu keberhasilan, untuk memenangkan pertarungan. Pada awalnya pengertian strategi hanya berkembang pada bidang militer yaitu bagaimana untuk memenangkan suatu peperangan, namun seiring dengan perkembangan jaman, strategi mengalami pergeseran ke bidang-bidang lain, termasuk bidang politik. Kata strategi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani 'strat-egia', yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan.

*Scroder menjelaskan bahwa jaman dahulu jika hendak berperang, dan untuk menggerakkan atau memobilisasi massa maka diperlukan seorang pemimpin, yang memiliki orientasi untuk mencapai tujuan akhir yaitu memenangkan pertempuran. Oleh sebab itu strategi*

*menjadi sangat penting karena untuk mencapai suatu kemenangan maka strategi yang tepat sangatlah diperlukan<sup>5</sup>.*

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat (Schroder. 2009: 7).

### **1) Konsolidasi**

Larry Diamond, dalam bukunya *Developing Democracy toward Consolidation* (1999), mengungkapkan definisi konsolidasi demokrasi sebagai persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Lanjutnya, konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka.

Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi yaitu :

- lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan mau pun masyarakat politik (O'Donnel dan Schmitter, 1993: 24-6).

---

<sup>5</sup> Schroder Peter, *Strategi Politik* (edisi bahasa Indonesia), yang diterjemahkan oleh. D.J Matindas, Friedrich\_Naumann\_Stiftung, hal. 4



- Adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.

## 2) Kader dan Kaderisasi

Pengertian kader adalah sumber daya manusia yang melakukan proses pengelolaan dalam suatu organisasi. Dalam pendapat lain kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum<sup>6</sup>

Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa kader merupakan sumber daya manusia sebagai calon anggota dalam organisasi yang melakukan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu. Proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi.

Menurut Mawasdi Rauf:

*Kaderisasi merupakan fungsi yang terabaikan sejak awal kehidupan partai politik sampai masa pasca Orde Baru sekarang ini. Pada masa lalu, kaderisasi dilakukan bukan oleh partai politik, melainkan oleh ormas-ormas yang menjadi underbow di partai. Pimpinan partai tinggal menerima kader-kader yang telah dihasilkan oleh ormas-ormas tersebut. Pada masa demokratisasi sekarang ini, pimpinan partai politik seharusnya melakukan pendidikan kader secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan kader-kader partai politik yang akan menjadi pimpinan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, tepat sekali bila dikatakan bahwa partai politik adalah penghasil pimpinan nasional di masa depan. Bila*

---

<sup>6</sup> Kahin, G, Mct, Nationalism and Revolution in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952)

*partai politik mampu menghasilkan kader yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.*

Proses kaderisasi, partai politik memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan militansi, salah satu caranya yaitu dengan penanaman ideologi atau yang biasa disebut visioning. Penanaman ideologi adalah faktor kunci pengkaderan yang dalam institusi yang merupakan bagian dari format pengkaderan formal dengan tahapan-tahapan yang dimatangkan oleh institusi yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.<sup>8</sup>

Sumber daya manusia sebagai calon anggota atau calon kader dalam partai politik akan menjalani proses seleksi yang disebut kaderisasi berupa pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan agar memahami platform partai, sejarah perjuangan partai, arah perjuangan partai dan strategi perjuangan politik yang digunakan oleh partai serta memiliki militansi yang tinggi pada partai politik tersebut. Salah satu caranya, yang merupakan faktor kunci yaitu dengan penanaman ideologi.

#### 1) Definisi Konseptual Mengenai Partai Kader

Makna dari partai kader, yaitu:

---

<sup>7</sup> Syafiuddin Tohir, PMII, 2007

<sup>8</sup> Jimly Assididqy, 2006: 160

*Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dengan keanggotaan berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya ideologi yang dianut partai ini adalah Konservatisme Ekstrem atau maksimal Reformis Moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Sehingga partai kader lebih tampak sebagai kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan disiplin.<sup>9</sup>*

Selain itu juga ada pengertian partai kader yang dikemukakan oleh Ari Darmastuti dan Tabah Maryanah<sup>10</sup>, yaitu:

*Partai kader, yaitu partai yang mengandalkan pada kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat, melalui pengkaderan yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten, tanpa pandang bulu. Struktur organisasi sangat hirarki sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas, karenanya sangat elitis.*

Berdasarkan dua pengertian partai kader dari ahli-ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik yang mengandalkan kualitas anggota serta keanggotaannya melalui sistem yang sudah ditentukan dengan ketat, berjenjang serta intensif yang memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Partai kader biasanya menganut ideologi Konservatisme Ekstrem atau maksimal Reformis Moderat.

## 2) Mempersiapkan kader

---

<sup>9</sup> Ichlasul Amal (1996: pengantar)

<sup>10</sup> Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia pada halaman 12

Kaderisasi lebih bersifat sebagai proses “intervensi” dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan sebagai fungsi partai. Selain itu, secara eksternal, kaderisasi juga berarti penting bagi tanggung jawab partai dalam melakukan pendidikan politik kepada publik.<sup>11</sup>

Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai. Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ini akan juga ditentukan oleh kecenderungan tipedari partai yang bersangkutan.

Agar proses kaderisasi ini dapat terjaga kontinuitasnya, maka dibutuhkan pelembagaan kaderisasi. Ada dua dimensi utama yang penting dicermati dalam rangka melakukan pelembagaan kaderisasi, yang sebenarnya menjadi ciri khas pelembagaan demokrasi dalam internal partai, yakni dimensi formal dan dimensi politis.

Dimensi formal berkenaan dengan soal bahwa internalisasi nilai-nilai demokrasi dan perjuangan partai butuh dicangkokkan melalui instrumen program pendidikan dan pembentukan lembaga yang khusus mengelola kaderisasi. Dengan kata lain ini berkenaan dengan pembentukan sistem formal kaderisasi. Sedangkan dimensi politis menempatkan kaderisasi dalam makna ruang politik, yakni ruang tarik-menarik atau kompetisi berbagai kepentingan atau faksi-faksi internal partai yang rawan konflik. Secara spesifik, benturan antara dimensi formal dan politis ini akan diawali dari

---

<sup>11</sup> Indra Bambang Utoyo, *Sistem Kaderisasi Kepemimpinan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Masa Mendatang*, (Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional, 1994), 50

ketegangan kebutuhan partai untuk menciptakan standar-standar kapasitas tertentu bagi para anggotanya di satu sisi, dan potensi kehendak politis untuk mengabaikannya.

### **3) Mekanisme Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan- golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas'ood bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.<sup>12</sup>

Menurut teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:

- Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang.
- Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman

---

<sup>12</sup> Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003) 188

hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan.

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka.

Hal inilah yang membuat terbukti apa yang diungkapkan oleh Maurice Duverger bahwa pada dasarnya semua orang yang berbakat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi elit, tetapi mereka kalah karena dihalangi oleh elit politik yang sedang berkuasa yang membentuk oligarki-oligarki kekuasaan.<sup>13</sup>

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik. Rekrutmen politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

- *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
- *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.

---

<sup>13</sup> 2SyamsuddinHaris, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki (Jakarta : PT Gramedia, 2005) 180

<sup>14</sup> Ibid., 183-185

- *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

a) Jalur Rekrutmen Politik

Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Didalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu diketahui secara luas antara lain:

- Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi partai merupakan bagian terpenting didalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
- Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu, jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua factor-faktor tersebut perlu kita kaji dan fahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Masyarakat harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh

persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun memberi keuntungan parta-partai tertentu.

- Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi adalah setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond menjelaskan rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri”. Jadi setiap individu harus mempunyai skill yang mampu diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.
- Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Pada modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi didunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatn tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial.



## b) Syarat Perekrutan dalam Partai Politik

Dalam tahapan penetapan calon kader yang akan menjadi bagian partai politik. Menurut Haryanto terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi di antaranya adalah<sup>15</sup> :

### ➤ Pengalaman Organisasi

Pengalaman ini baik selama ia menjadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.

### ➤ Tingkat Pendidikan

Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan perilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.

### ➤ Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

Hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya. Dapatlah dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau peny eleksian, akan tetapi walaupun prosedur - prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecendrungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan

---

<sup>15</sup> Haryanto, Politik suatu pengantar, (Yogyakarta : Liberty,1982) 47

pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Rekrutmen Politik dengan memahami bahwa rekrutmen dalam partai politik adalah untuk memilih anggota atau kader yang dapat mengembangkan partai politik ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki anggota yang mampu berdaya saing akan menguntungkan bagi partai karena akan memiliki kepercayaan masyarakat.

Kemudian penting bagi partai politik untuk menerapkan setiap teori dan konsep rekrutmen politik pada tubuh partai. Salah satunya memahami konteks rekrutmen dan tahapan seleksi itu sendiri.

#### **4) Positioning**

Menurut Newman dan Shet (dalam Nursal, 2004; 159) Pilihan strategi positioning untuk merebut dan mempertahankan pasar juga dapat dilakukan dengan memperhatikan citra kinerja sebuah kontestan (kandidat atau partai politik).

Pilihan strategi dapat dibuat dengan mengembangkan matriks yang menghubungkan citra sebuah kontestan dengan kinerja politiknya setelah terpilih seperti terlihat pada tabel berikut, dapat dipilih lebih dari satu strategi dengan tingkat resiko yang berbeda.

**Tabel 1.1**  
**Strategi Positioning**

Kinerja (kecocokan dengan citra)		
Citra kontestan (kecocokan dengan aspirasi pemilih tertentu)	Cocok	Tidak cocok
Cocok	<i>Reinforcement strategy</i>	<i>Rationalization strategy</i>
Tidak cocok	<i>Inducement strategy</i>	<i>Confrontation strategy</i>

Sumber : Adman Nursal, *Political Marketing*, 2004

Berdasarkan tabel di atas, partai politik dapat memilih lebih dari satu strategi dengan tingkat resiko yang berbeda, 4 (empat) pilihan strategi itu dijabarkan sebagai berikut:

a) Reinforcement strategy (strategi penguatan)

Strategi ini dapat digunakan oleh sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu. Komunikasi difokuskan kepada orang-orang yang dulu memilih kontestan ini dengan pesan bahwa “pilihan anda dulu itu sudah tepat dan tetaplah membuat pilihan yang sama untuk pemilihan saat ini”

b) Rationalization strategy (strategi rasionalisasi)

Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

c) Inducement strategy (strategi bujukan)

Strategi ini dapat diterapkan oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja atau atribut-atribut yang cocok dengan citra lainnya.

d) Confrontation strategy (strategi konfrontasi)

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih. Bias saja pada suatu pemilu, sebagian pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang jelek, tetapi ternyata kandidat tersebut tidak menghasilkan kinerja yang diharapkan.

## 5) Kampanye Politik

Kampanye menurut Kotler dan Roberto (1989) "*campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior,*" kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agenperubahan) yang ditunjuk untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Oleh karena itu, Richard A. Jostyn dalam Swanson (1990) melukiskan kampanye politik tidak beda nya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh para aktor-aktor politik.

Dalam praktik tidak sedikit kegiatan kampanye yang dilakukan menemui kegagalan, tetapi banyak juga yang berhasil karena dirancang dengan baik sesuai oleh seorang ahli yang berperan sebagai *spin doctor*.

*Spin doctor* dikenal dalam dunia kampanye politik, orang lebih banyak mengenal aktifitas konsultan *public relations* politik yang bertugas membangun *image* (citra) politik bagi seorang politikus, di lain pihak dimaksudkan memberikan kesan yang negatif pada saingannya (Louw dalam Handayani, 2005). Profesi konsultasi Public relations Politik atau biasa disebut *press agent* atau *publicist*.

## 6) Strategi Pencitraan

Tujuan dari strategi ini adalah membentuk citra diri Calon Legislatif sesuai dengan visi, misi dan target pemilih, menentukan media komunikasi politik yang efektif, mendesign isi komunikasi politik, serta upaya mempengaruhi isi liputan media massa. Implementasinya meliputi:<sup>16</sup>

- a) Pembentukan media center (Mengorganisasi program, target dan evaluasi program pencitraan kandidat).
- b) Taktik komunikasi media cetak, radio, dan TV (Design, contain, timing, volume dan budgeting). Taktik komunikasi media out door (Design, isi, timing, volume, budgeting).
- c) Taktik komunikasi sosial (Design, isi, timing, volume, budgeting).
- d) Taktik komunikasi tatap muka dan Taktik komunikasi alternatif. Selain strategi di atas, ada juga strategi yang dapat dilakukan pada tahan pra-pemilu dan pelaksanaan pemilu, yaitu:
  - Pemasaran produk politik secara langsung kepada calon pemilih (push political marketing), strategi ini dapat membangun mesin politik partai dan implementasinya meliputi: Pelatihan manajemen tim sukses, Set up jaringan parpol dan birokrasi, Set up jaringan keluarga, Set up jaringan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, dan jaringanjaringan lainnya sebagai mesin politik partai. Parpol telah melakukan strategi ini melalui pembentukan organisasi atau struktur sayap, merampungkan kepengurusan dari pusat sampai kecamatan, dan strategi ini dipertajam

---

<sup>16</sup> Ritzer G., & Goodman D., 2008: 58

melalui Pelatihan untuk menciptakan kader yang militan sampai tingkat terbawah

- Pemasaran produk politik melalui media massa (pull political marketing), strategi ini merupakan upaya peningkatan popularitas partai, implementasinya meliputi: Internet, Produksi souvenir, Produksi media komunikasi massa cetak, Produksi media komunikasi massa out door, Produksi iklan media TV, Radio, dan Cetak, serta Kampanye Door to Door.
- Pemasaran melalui kelompok, tokoh atau organisasi yang berpengaruh (pass political marketing), strategi ini dilakukan untuk mengenalkan pesan-pesan politiknya, hal tersebut dapat dikatakan upaya peningkatan elektabilitas partai, implementasinya meliputi: Kunjungan langsung terprogram, Kunjungan langsung insidental, Ceramah, Aksi sosial terprogram, Aksi sosial insidental, Peresmian, Kontrak politik, Turnamen, Pawai, Hiburan dan Kesenian, Media komunikasi tradisional, Media komunikasi alternatif, Pencetakan Mesium Rekor Indonesia, dan program kunjungan lainnya.

## **7) Pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik**

### **a) Pendekatan Tradisional (Tradisional Approach)**

Negara menjadi focus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis. Bahasan pendekatan ini menyangkut, misalnya : Sifat Undang-Undang Dasar serta kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal, badan yudikatif, badan eksekutif, dsb. Karenanya pendekatan ini disebut juga pendekatan institusional atau legal-institusional.

*Contoh Pendekatan Tradisional:*

Dengan pendekatan ini, dalam mempelajari parlemen, maka yang diperhatikan adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah (UUD,UU, atau Peraturan Tata Tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi serta hasilnya.

Beberapa kelemahan pendekatan tradisional, antara lain:<sup>17</sup>

- Pendekatan ini tidak meneliti apakah lembaga kenegaraan memang terbentuk dan berfungsi seperti yang diuraikan dalam naskah-naskah resmi kenegaraan.
- Cenderung kurang menyoroiti organisasi-organisasi yang tidak formal, seperti kelompok kepentingan dan media massa.
- Bahasan lebih deskriptif daripada analitis.
- Lebih banyak menggunakan ulasan sejarah, seperti menelusuri perkembangan parlemen.
- Lebih bersifat normative karena fakta dan norma kurang dibedakan, bahkan seringkali saling berkaitan.
- Kurang memberikan sumbangan terhadap pembentukan teori baru

**b) Pendekatan Tingkah Laku (Behavioral Approach)**

Salah satu pemikiran pokok dari pelopor-pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat bagi peneliti untuk mempelajari

---

<sup>17</sup> udiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati.

*Contoh Pendekatan Perilaku:*

Dalam mempelajari parlemen, maka yang dibahas adalah perilaku anggota parlemen, yaitu: bagaimana pola pemberian suaranya (voting behavior) terhadap rancangan UU, giat atau tidaknya memprakarsai UU, kegiatan lobbying, dsb.

*Ciri-Ciri Pendekatan Tingkah Laku:*

- Pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner, maksudnya tidak saja mempelajari dampak faktor pribadi tetapi juga dampak dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya.
- Merupakan suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi ini mencakup beberapa konsep pokok (David Easton dan Albert Somit), antara lain:
  - Perilaku politik menampilkan keteraturan (regularities).
  - Generalisasi-generalisasi ini pada dasarnya harus dapat dibuktikan keabsahan atau kebenarannya (verification).
  - Teknik-teknik penelitian yang cermat harus digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
  - Pengukuran dan kuantifikasi (antara lain melalui statistik dan matematika ) harus digunakan untuk mencapai kecermatan dalam penelitian.
  - Harus ada usaha untuk membedakan secara jelas antara norma (ideal atau standard yang harus menjadi pedoman untuk tingkah



laku) dan fakta (sesuatu yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan atau pengalaman).

- Penelitian harus bersifat sistematis dan berkaitan dengan pembinaan teori.
- Ilmu politik harus bersifat murni (pure science) dalam arti bahwa usaha untuk memahami dan menjelaskan perilaku politik harus mendahului usaha untuk menerapkan pengetahuan itu bagi penyelesaian masalah-masalah social.
- Dalam penelitian politik diperlukan sikap terbuka serta integrasi dengan konsep-konsep dan teori-teori ilmu lainnya
- Pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagian saling berinteraksi serta saling bergantung dan semua bagian bekerjasama untuk menunjang terselenggaranya sistem tersebut.
- Sumbangan pendekatan perilaku pada usaha untuk memajukan Ilmu Perbandingan Politik

**c) Pendekatan Pasca perilaku (Post Behavioral Approach)**

Gerakan pascaperilaku memperjuangkan perlunya relevance and action (relevansi dan orientasi bertindak). Reaksi ini ditujukan kepada usaha mengubah penelitian dan pendidikan Ilmu Politik menjadi suatu ilmu pengetahuan murni sesuai dengan pola ilmu eksakta. Pada hakikatnya pendekatan ini merupakan “kesinambungan” sekaligus “koreksi” dari

pendekatan perilaku.<sup>18</sup> Pokok-pokok pendekatan Pascaperilaku yang diuraikan oleh David Easton, antara lain:

- Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Relevansi ini dianggap penting daripada penelitian yang cermat. b.
- Karena penelitian ini dianggap terlalu abstrak, Ilmu Politik kehilangan kontak dengan realitas sosial.
- Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas Ilmu Politik.
- Para cendekiawan memiliki tugas yang historis dan unik untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
- Cendekiawan harus action oriented
- Cendekiawan tidak boleh menghindari perjuangan dan harus turt mempolitisi organisasi-organisas.

**d) Teori Ketergantungan (Dependency Theory)**

Teori ini penelitiannya pada hubungan antara negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Teori ini mulai dirintis tahun 1960-an oleh *Paul Baran*, kemudian disusul oleh *GUnder Frank*. Menurut mereka imperialisme masih hidup, negara penjajah telah melepas jajahannya tapi perekonomian mereka masih dikendalikan oleh negara penjajah. Menurut mereka pembangunan oleh negara yang kurang maju hampir berkaitan dengan kepentingan barat, karena negara ke tiga belum dapat menyediakan SDM dan SDA, negara maju diuntungkan, karena memperlakukan gaji dan sewa yang murah, dan

---

<sup>18</sup> Miriam. Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik . (Jakarta: Gramedia. 2008.)H. 56-67

negara kurang maju menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju, produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju.

Yang paling ekstrem adalah pemikiran pelopor teori ketergantungan, *Andre Gunder Fran (1960-an)* yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global. Sementara penulis lain *Henrique Cardoso (1979)* menganggap bahwa pembangunan yang independen ada kemungkinan terjadi, sehingga revolusi sosial tidak mutlak harus terjadi. Yang menarik dari tulisan-tulisan kalangan pendukung Teori Ketergantungan (*dependencia*), yang pada awalnya memusatkan perhatian pada negara-negara Amerika Selatan, adalah pandangan mereka yang membuka mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi ini.

**e) Pendekatan Pilihan Rasional (Rasional Choice)**

Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi salah satu ilmu yang benar-benar science, dikatakan bahwa manusia Homo Politicus. Mereka percaya dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan-kepentingan dari actor yang bersangkutan (*involved*). Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai actor terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk rasional ia selalu mempunyai tujuan-tujuan (goal seeking / goal oriented) yang mencerminkan apa yang dianggap kepentingan diri sendiri. Pelaku Rational Act ini, terutama politisi, birokrat, pemilih, dan actor ekonomi, pada dasarnya egois dan segala tindakannya berdasarkan kecenderungan ini. Sekalipun berbagai penganut Rational Choice mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, substansi dasar dari doktrin ini telah dirumuskan oleh *James B. Rule*, sebagai berikut:

- Tindakan manusia (human action) pada dasarnya adalah instrument, agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh.
- Para actor merumuskan perelakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya.
- Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti ratings, institusi dan praktik-praktik merupakan hasil kalkulasi seperti itu.<sup>19</sup>

Mahzab ini sangat ditentang oleh para penganut structural-functionalism karena dianggap tidak memperhatikan kenyataan bahwa manusia dalam perilaku politiknya sering tidak rasional. Kritik lain ialah bahwa memaksimalkan kepentingan sendiri cenderung secara tidak langsung mengabaikan kesejahteraan orang lain dan kepentingan umum, seolah olah mengabaikan unsure etika. Bagaimanapun juga Pendekatan Rational Choice sangat berjasa untuk mendorong usaha kuantifikasi dalam ilmu politik dan mengembangkan sifat empiris yang dapat dibuktikan kebenarannya. Salah satu reaksi terhadap pendekatan Rational Choice adalah timbulnya perhatian kembali pada karya John Rawls, *A Theory of Justice* (1971) yang mengargumentasikan bahwa nilai nilai seperti keadilan, persamaan hak, dan moralitas merupakan sifat manusia yang perlu diprhitungkan dan dikembangkan. Sementara para structural-funcionalist melihat negara sebagai salah satu sistem dari sekian banyak sistem, maka para Neo-Marxis memandang negara sabagai fator negative dalam onstelasi politik, karena sifatnya represif. Kedua pandangan ini mendorong beberapa sarjana untuk meninjau kembali peran negara di masa modern.

---

<sup>19</sup> Ibid, H 67-80

## **8) Strategi menembus pasar**

Menurut Peter Schroder, strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki dalam kelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Hal ini menyangkut pemasaran program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompokkelompok target. Bagi organisasi ini berarti:

- Peningkatan motivasi multiplikator dan pemegang jabatan, melalui iklan keuntungan yang ditawarkan secara lebih baik.
- Pemanfaatan jalur komunikasi yang baru
- Perbaikan argumentasi melalui pembinaan.
- Penggerakan emosi kelompok target dengan memanfaatkan iklim/keadaan tertentu dengan menciptakan gambaran musuh bersama. Investasi haruslah dilakukan dalam bidang kehumasan dan bagi pembinaan.

**Tabel 1.2**

### **Tinjauan tentang pendekatan-pendekatan Strategi**

No	Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku	Strategi O fensif (Perluasan pasar)	Strategi O fensif (Menembus pasar)
1	Pemilih	Menarik kelompok pemilih yang baru	memanfaatkan potensi yang ada agar lebih efektif
2	Lingkungan Eksternal	Memfaatkan perubahan nilai, perubahan struktural dan teknologi komunikasi baru	Memfaatkan teknologi komunikasi baru dan memanfaatkan iklim yang ada
3	Anggota pemenang	Perkrutan anggota /pengembangan SDM	Memberikan pelatihan dan memberikan motivasi anggota
4	Organisasi /Partai	Mempersiapkan organisasi untuk kelompok target baru, memfasilitasi partisipasi kelompok target baru, memelihara anggota baru	Mengoptimalkan proses operasional, memperluas aplikasi teknologi informasi

Sumber : Adnan Nursal, *Politik Marketing*, 2004

Menurut Daed Yoesoef (1981: 2) bahwa studi strategi dan studi hubungan internasional merupakan hal yang sangat berkaitan. Keduanya dapat dibedakan secara substansial namun sulit untuk dipisahkan. Terwujudnya suatu strategi pada dasarnya melalui empat tahapan :

- a. Tahap perumusan yaitu, perbuatan intelektual.

Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

- b. Tahap pemutusan yaitu, perbuatan politis.

Tahap kedua yakni peralatan politik meliputi diplomasi, kebijakan (politik), pertahanan ekonomi, peralatan psikologi dan angkatan bersenjata. Peralatan ekonomi meliputi semua potensi ekonomi masyarakat.

- c. Tahap pelaksanaan yaitu, perbuatan teknis.

Pada tahap ketiga, pengertian strategi mengalami evolusi dari pengertian sempit ke pengertian luas. Dalam pengertian sempit, strategi diartikan sebagai seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh politik. Secara luas strategi diartikan sebagai seni

menggunakan berbagai kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik.

d. Tahap penilaian adalah perbuatan intelektual.

Keputusan-keputusan strategi memiliki karakteristik berikut :

- Penting
- Tidak mudah diganti
- Melibatkan komitmen atas sumber daya dalam waktu tertentu
- Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah upaya

menyusun perencanaan dengan langkah-langkah sistematis guna memenangkan

suatu pertempuran secara politis. Terdapat unsur-unsur tambahan agar berbagai

strategi yang telah disusun (direncanakan), berjalan maksimal yaitu, taktik.

Taktik

yang baik sangat diperlukan dalam memukul atau mengalahkan lawan, secara ideologi maupun politik.

## **2. Partai Politik**

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita sebagai partai politik, partai bukan dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Biasa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan panjang manusia, jauh lebih muda dari organisasi Negara, dan kelahirannya baru bias dijumpai diberbagai Negara-negara modern.

Dan partai politik juga telah menjadi bagian dari fenomena umum dalam kehidupan politik yang demokrasi.

Kehadiran partai politik sangat penting karena dia adalah sebuah wadah dalam organisasi untuk memperjuangkan kedudukan politik yang bersifat ideologis didalam Negara. Semangat partai dan persaingan antara partai sudah menjadi bagian dari integral di dalam politik, semangat dan persaingan tersebut diarahkan sedemikian mungkin agar dapat bersifat profesional dalam menuju perolehan kemenangan dalam proses pemilu.

#### a. Pengertian Partai Politik

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik juga memiliki arti yang sangat penting dan telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik yang demokrasi. Aksioma yang berlaku tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa partai politik, kecuali sistem politik otoriter atau sistem kekuasaan Tradisional, dimana Raja atau penguasa dalam menjalankan kekuasaannya bergantung pada Tentara atau Polisi.<sup>20</sup>

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

---

<sup>20</sup> Roy C Marcrdis, *pengantar sejarah, fungsi dan tipologi partai*, dalam Ichlasul (ed) *teori teori mutakhir partai politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988, hal 18.



Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana.

Di antaranya sebagai berikut :

Menurut Carl J Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat riil maupun materil.<sup>21</sup>

Sigmund Neumann dalam karyanya, *Modern political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut.

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan sesuatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>22</sup>

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi.

#### b. Tujuan Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

#### c. Fungsi Partai Politik

Dengan mengidentifikasi suatu partai dalam pola partai politik, kita bisa mengetahui bagaimana politik dapat berjalan dengan sepenuhnya atau sebagian saja, hal ini

---

<sup>21</sup> Mariam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 367

<sup>22</sup> Sigmund Neumann. "Modern Political Parties," dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 404

terjadi karena memang perubahan politik di Negara kita terjadi begitu cepat sehingga manajemen perubahan berjalan lebih lambat dibanding perubahan itu sendiri. Sebagai fokus adanya partisipasi politik dengan perlembagaan politik yang merupakan stabilitas dari system Negara itu sendiri.<sup>23</sup>

1) Parpol sebagai sarana komunikasi politik

Dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Ssudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

Seandainya jika tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi kominikasi partai politik

Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dirumuskan kedalam program atau *platform* partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada peerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat tersampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

---

<sup>23</sup>Smauel.P Hauntington, *dalam partai politik agenda stransisi demokrasi*. Hal 84

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam hal itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi social dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.<sup>24</sup>

Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi semacam itu menghambat perkembangannya kehidupan politik yang sehat.

---

<sup>24</sup> Sigmund Neumann "Modern Political Parties". Hlm 352.

## 2) Parpol sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam ilmu politik, sosialisasi politi diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena poltik yang umumnya berlaku dalam masyarakatdimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalism, kelas, suku bangsa, idiologi, hak dan kewajiban

Dimensi lain dari sosialisai politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan :budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari suatu generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan factor penting dalam terbentuknya budayapolitik (*political culture*) suatu bangsa.

Suatu defenisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M.Rush (1992):

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenalli system politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.<sup>25</sup>

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letak partai ndalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan

---

<sup>25</sup> M. Rush, *politics and Society: An Introduction to Political Sociology* (Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheap, 1992), hlm. 92.

melalui berbagai cara yaitu media masa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai kepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Ada lagi yang paling tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan disini bahwa dinegara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional dan integrasi nasional. Ini adalah tugas lain dalam kaitannya dengan sosialisasi politik

Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai. Yang melebihi loyalitas kepada Negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat mengakibatkan pengtakan dan tidak membantu proses integrasi, yang bagi Negara-negara berkembang menjadi penting.

### 3) Parpol sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik keemimpinan internal partai maupun nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkat seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

#### 4) Parpol sebagai saran pengatur konflik

Potensi konflik selalu ada di tiap masyarakat, apabila di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, social-ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan itu menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi,

persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi didalam Negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan mudah mengundak konflik.

Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga menyakinkan penduduknya.

Pada tataran yang lain dapat dilihat pendapat dari ahli yang lain, Arend Lijphart (1968).

Menurut Lijphart: Perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa dapat diatasi oleh kerja sama di antara elit-elit politik.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menentukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di Negara demokrasi.

Dipihak lain dapat dilihat bahwa sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada. Dan jika hal ini terjadi dalam suatu masyarakat yang rendah kadar consensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik.

### **3. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

#### **F. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Konsep ini digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.<sup>26</sup> Apapun yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian Antara konsep yang satu dan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

##### **1. Partai Politik**

Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, dan berusaha untuk merebut kekuasaan. Partai politik yang dimaksud dalam adalah partai politik yang turut mendukung kandidat

---

<sup>26</sup>Masri Singarimbun. Metode penelitian survey, LP3S, 1992, hal 34



dalam Pilkada Kabupaten Sleman. Diantaranya PAN, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKB dan Partai Golkar .

## 2. Pilkada

Pilkada adalah sebuah proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara terbuka, jujur dan adil, sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang dimaksud dalam pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman 2015

## 3. Pemasaran

pemasaran adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat untuk menyampaikan pesan politik, berupa kebijakan, program, visi misi, dalam sebuah pemilu atau pilkada. Pemasaran politik yang dimaksud dalam penelitian adalah pemasaran politik partai PAN dalam memenangkan pilkada Kabupaten Sleman 2015

## 4. Strategi

Strategi adalah sebuah metode atau trik untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Strategi dalam penelitian ini adalah strategi PAN dalam memenangkan pilkada Kabupaten Sleman 2015

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional adalah bagaimana mengukur dan melihat suatu variable. Sehingga penelitian ini akan benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya maka perlu dioperasikan dalam penelitian. Dengan kata lain variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variable yang sudah dicermati.

Untuk memudahkan penulis dalam mengukur variabelnya, maka dari itu penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Opein.Firmansyah. Hal 109-110

## 1. Strategi Internal

Strategi pemberdayaan dalam struktur, interkasi dalam budaya organisasi dan optimalisasi sumberdaya partai meliputi.

### Mesin Partai

- a) Konsolidasi internal: memainkan fungsi struktur melalui pembagian tugas yang jelas untuk memudahkan kordinasi.
- b) Mempersiapkan kader
- c) System rekrutmen kandidat
- d) Positioning

## 2. Strategi eksternal

Strategi yang ditunjukkan oleh partai atau kandidat kepada pihak-pihak yang berbeda diluar lingkungan partai atau kandidat. Strategi ini berupa:

- Kampanye Politik

Kempanye politik meliputi: bentuk-bentuk kampanye, metode kampanye, dan instrument kampanye yang digunakan.

- Perbaikan citra politik melalui media masa.
- Melakukan pendekatan Politik dengan ormas-ormas yang berbasis agama, karena masyarakat Kabupaten Sleman masih memiliki loyalitas yang tinggi terhadap tokoh agama.

## **H. METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasan ini akan menjelaskan beberapa aspek yakni: jenis dan dasar penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumentasi yang tepat. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi politik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional.

### 2. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yakni informan yang langsung berhubungan dengan focus penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan informasi. Mereka yang dijadikan informan adalah DPC PAN Kabupaten Sleman, tim sukses dan tokoh masyarakat.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahkan referensi lainnya yang berkaitan dengan strategi politik dalam pemilu. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari strategi politik yang digunakan partai untuk memperoleh kemenangan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam (*deep interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban.

Salah satu varian dari teknik wawancara adalah wawancara mendalam (*deep interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah yang diangkat. Mereka yang dijadikan informan adalah:

- Ketua atau pengurus DPC PAN Kabupaten Sleman
- DPC Partai Demokrat Kabupaten Sleman
- Tokoh Masyarakat
- Tim sukses Sri purnomo dan Sri Multimatum

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/ dikeluarkan oleh lembaga/ perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/ dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan disajikan sebagai sumber referensi adalah hasil rapat.

Dokumentasi juga merupakan kegiatan khusus berupa pengumpulan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.<sup>28</sup> Data-data tertulis dari KPUD kota Yogyakarta yang didapat melalui internet maupun didapat secara langsung, data dari surat kabar, makalah, arsip, yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan dokumentasi yang dibutuhkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut *bogdan and taylor* 1984 metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai strategi politik yang digunakan oleh PAN dalam memenangkan pemilu pada tahun 2015. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersama dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang digunakan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

##### a. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis

---

<sup>28</sup>*ibid*, hal. 299.

dilapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menanjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak layak/ tidak perlu. Dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rup sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh panitia. Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan beberapa data didasarrkan kepentingan penulisan sehingga didapatkan pemisahan data yang penting dengan yang kurang penting. Proses reduksi data adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada proses penulisan laporan akhir selesai dilakukan.

b. Sajian Data

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian menggabungkan informasi yang telah didapat berupa data-data yang diambil dari setiap infoman, data berupa rekaman atau dokumen dari penyajian data ini akan menentukan suatu analisis.

Pada tahap penyajian data peneliti pengelompokan data berdasarkan kelompok informan, sehingga diketahui beberapa informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (infoman).

Sajian data dilakukan bertujuan untuk memahami berbagai hal yang dilakukan oleh tim pemenang partai, semua data ada kemudian dirancang untuk meyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai strategi politik PAN dalam pemilukada di Kabupaten Sleman.